



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KAB. KUTAI KARTANEGARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos.M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs.Edi Damansyah, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

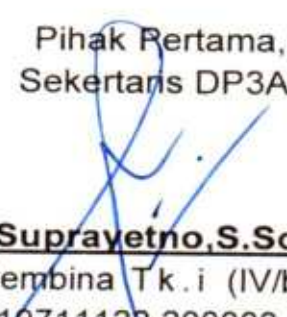
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Sekertaris DP3A


H.Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711122 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,149999999999999
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,33000000000000002
3	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,039
4	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100

5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)

14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
19	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
20	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp.1.000.000.000,,	APBD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp.6.740.663.232,,	APBD
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Rp.105.000.000,,	APBD
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp.70.000.000,,	APBD
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp.439.500.000,,	APBD
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.79.647.000,,	APBD
7	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.618.900.356,,	APBD
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.95.000.000,,	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.9.148.737.588,,	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si

Pihak Pertama,
Seketaris DP3A

H.Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si.

Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19711122 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj.Aji Selvi Yunaida, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian DPPPA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.Hero Suprayetno, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris DPPPA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Seketarsi DPPPA

H.Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.i (IV/b)

NIP. 19711122200003 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE

Penata TKI (III/d)

NIP. 196812221995032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
11	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	unit	12
15	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Aparatur ASN	20

16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4
17	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan	jumlah Bahan Cetak dan Pengadaan	Cetakan	1000
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	exemplar	2112
19	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	53
21	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Paket	1
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyedia Jasa Komunikasi dan Informasi	Bulan	12
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	35
24	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Aparatur Non ASN yang dibayarkan Perbulan	Bulan	12

25	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12
26	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	unit	2
27	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat ,buku kendali kenaikan gaji berkala,buku kendali pensiunan,daftar normatif presensi pegawai,sasaran kinerja pegawai,daftar urut kepangkatan,usul kenaikan pangkat,masa persiapan pensiun,asuransi kesehatan,tabungan dan asuransi pegawai negeri,kartu pegawai,kartu isteri/kartu suami,penghargaan,pemberian sanksi,cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian Pegawai,Penginputan Aplikasi kepegawaian Srikandi,Simpeg,Simona,Anjab ABK,TPP,Sekejab Dan Seluruh Aplikasi Kepegawaian Lainnya.	jumlah data administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat ,buku kendali kenaikan gaji berkala,buku kendali pensiunan,daftar normatif presensi pegawai,sasaran kinerja pegawai,daftar urut kepangkatan,usul kenaikan pangkat,masa persiapan pensiun,asuransi kesehatan,tabungan dan asuransi pegawai negeri,kartu pegawai,kartu isteri/kartu suami,penghargaan,pemberian sanksi,cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian Pegawai,Penginputan Aplikasi kepegawaian Srikandi,Simpeg,Simona,Anjab ABK,TPP,Sekejab Dan Seluruh Aplikasi Kepegawaian Lainnya.	Laporan	1
28	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dokumen	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp.1.000.000.000,-	APBD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp.6.740.663.232,-	APBD
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Rp.105.000.000,-	APBD
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp.70.000.000,-	APBD
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp.439.500.000,-	APBD
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.79.674.000,-	APBD
7	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.618.900.356,-	APBD
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.95.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.9.148.737.588,-	APBD

Kutai Kartanegara, 22 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekertaris DP3A

H.Hero Suprayetno.S.Sos.,M.Si.
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag Umtalpeg DP3A

Hj.Aji Selvi Yunaida. SE
Penata TK.1 (III/d)
NIP. 196812221995032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Pusfita Sari, ST

Jabatan : Analis Data & Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj.Aji Selvi Yunaida, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian DPPPA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Ira Pusfita Sari, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 198105302007012016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
2	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
3	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Aparatur ASN	20
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	53

8	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Paket	1
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyedia Jasa Komunikasi dan Informasi	Bulan	12
10	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dokumen	1
11	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat ,buku kendali kenaikan gaji berkala,buku kendali pensiunan,daftar normatif presensi pegawai,sasaran kinerja pegawai,daftar urutan kepangkatan,usul kenaikan pangkat,masa persiapan pensiun,asuransi kesehatan,tabungan dan asuransi pegawai negeri,kartu pegawai,kartu isteri/kartu suami,penghargaan,pemberian sanksi,cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian Pegawai,Penginputan Aplikasi kepegawaian Srikandi,Simpeg,Simona,Anjab ABK,TPP,Sekejab Dan Seluruh Aplikasi Kepegawaian Lainnya.	Data & Dokumen administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat ,buku kendali kenaikan gaji berkala,buku kendali pensiunan,daftar normatif presensi pegawai,sasaran kinerja pegawai,daftar urutan kepangkatan,usul kenaikan pangkat,masa persiapan pensiun,asuransi kesehatan,tabungan dan asuransi pegawai negeri,kartu pegawai,kartu isteri/kartu suami,penghargaan,pemberian sanksi,cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian Pegawai,Penginputan Aplikasi kepegawaian Srikandi,Simpeg,Simona,Anjab ABK,TPP,Sekejab Dan Seluruh Aplikasi Kepegawaian Lainnya.	Laporan	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp.1.000.000.000,-	APBD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp6.740.663.232,-	APBD
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Rp.105.000.000,-	APBD
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp.70.000.000,-	APBD
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp.439.500.000,-	APBD
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.79.674.000,-	APBD
7	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.618.900.356,-	APBD
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.95.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.9.148.737.588,-	APBD

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



HJ. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata TK.1 (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Ira Pusfita Sari, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 198105302007012016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlia Dahliyanti

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj.Aji Selvi Yunaida, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian DPPPA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan kepuasan Masyarakat , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Maria Dahliyanti
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198501032010012033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Paket	1
2	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gema yang terlaksana	Laporan	48
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Naik Pangkat	Orang	2
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Usul KGB	Orang	7
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN CUTI	Orang	5
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah SKP yang terselesaikan Perbulan	Dokumen	13
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Perjanjian Kerja	Dokumen	1
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tugas yang terselesaikan	Tugas	25

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
-----	---------	----------	------------

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Marlia Dahliyanti
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198501032010012033



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Aspianni

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj.Aji Selvi Yunaida, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian DPPPA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A

Hj. Aji Selvi Yunaida, SE

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,

Dewi Aspianni

Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198304212010012043

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Penataan Arsip	Paket	1
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Unit	12
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah yang Terfasilitasi	Bulan	12
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
5	Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	Kepatuhan Standar Pelayan Publik	Zona Hijau	Hijau
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	53
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

9	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
10	Pendataan dan Penginfutan Aplikasi SRIKANDI, Tunjangan Pendapatan Penghasilan dan SIMPEG	Jumlah Data Administrasi Penginfutan Aplikasi SRIKANDI, Tunjangan Pendapatan Penghasilan dan SIMPEG	Laporan	1
11	Sosilaisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	Aparatur ASN	20

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
-----	---------	----------	------------

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Dewi Aspianni
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198304212010012043



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Sia Dinata

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj.Aji Selvi Yunaida, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian DPPPA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Dodi Sia Dinata
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198111112010011023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kali	48
2	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	Aparatur ASN	20
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Penataan Arsip	Paket	1
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Administrasi Kepegawaian	Laporan	1
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
-----	---------	----------	------------

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Dodi Sia Dinata
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198111112010011023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paidil

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj.Aji Selvi Yunaida, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian DPPPA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Paidil
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198209292008011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kegiatan	48
2	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Unit	12
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur ASN	20
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4
6	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	35
7	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12
8	Penyedia Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	2
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
-----	---------	----------	------------

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umtalpeg DP3A



Hj. Aji Selvi Yunaida, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196812221995032004

Pihak Pertama,



Paidil
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198209292008011019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maslianti, SE., M.Si

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Supravetno, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda


Maslianti, SE., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740906 200012 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

7	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
8	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak

H.Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina IKK.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda



Maslianti, SE., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740906 200012 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Lusiana, S.Sos

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan kepuasan Masyarakat , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

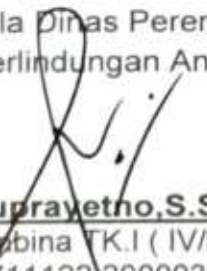
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


Anita Lusiana, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710327 200701 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Tingkat ketaatan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Wajib Laport SPT Tahunan DJP On line	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan Waktu Input e-Pantau dan Telah di Verifikasi 100% Pertanggal 10 Setiap Bulan	Persen	100
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100

10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Perangkat Daerah Paling Lambat akhir bulan februari setiap tahun	Dokumen	100
13	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak

H.Hero Suprayatno,S.Sos.,M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

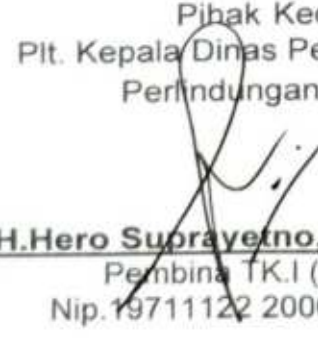
Anita Lusiana,S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710327 200701 2 016

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

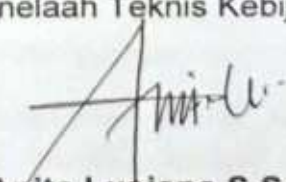
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Wali Data Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp.24.629.800	APBD
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp.108.971.200	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.13.440.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp.116.196.000	APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.12.860.000.	APBD
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.395.494.858	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.671591858	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


Anita Lusiana, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710327 200701 2
016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Octaviani
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah teknis Kebijakan


Dian Octaviani.
Pengatur TK I/II/d
NIP. 19851022 201001 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
3	Tingkat kapatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun 2025	Tingkat kapatuhan Penyampaian Wajib Lapor Tahunan DJP On Line 2025	Laporan	100
4	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9	Melaksanakan Tata Kelola Arsip	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Dokumen	100

11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan(LK)SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD pertanggal 24 Januari Setiap Tahun	Dokumen	100

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak

H.Hero Suprayetho,S.Sos.,M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19711122200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah teknis Kebijakan

Dian Octaviani.
Pengatur TK I/II/d
NIP. 19851022 201001 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joni Saputra, S.Sos
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

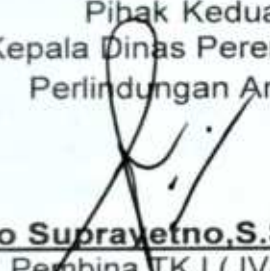
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

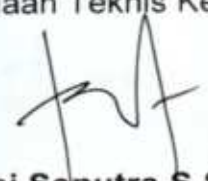
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


Joni Saputra, S.Sos.
Penata TK I / III/d
NIP. 19780602 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
5	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
6	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
7	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak

H.Hero Suprayetno,S.Sos.,M.Si

Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

Joni Saputra,S.Sos.

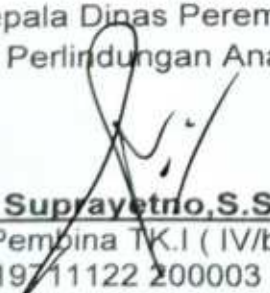
Penata TK I / III/d
NIP. 19780602 200701 1 008

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

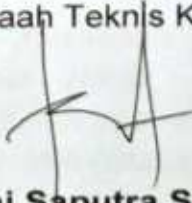
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANA PERANGKAT DAERAH	Rp.235.236.100	APBD
2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IHKTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp.25.200.000	APBD
3	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp.65.050.000	APBD
4	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Rp.26.506.000	APBD
5	GAJIH ASN	Rp.6.561.465.433	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.6.913.457.533	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


Joni Saputra, S.Sos.
Penata TK I / III/d
NIP. 19780602 200701 1
008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusniar Rulisa, SE

Jabatan : Pengolah Data

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan kepuasan Masyarakat , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak

H.Hero Suprayetno,S.Sos.,M.Si
Pembina K.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Pengeloh Data dan Informasi


Yusniar Rulisa,SE
Penata (III/d)
NIP. 19681212 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
2	Tingkat kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun 2025	Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor SPT Tahunan 2025	Persen	100
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Dokumen	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
9	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

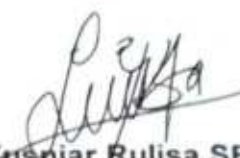
Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

Pembina TK.I (IV/b)
Nip. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Data dan Informasi


Yushiar Rulisa, SE

Penata (III/d)
NIP. 19681212 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Asikin

Jabatan : Pengadministrasi Pengkantor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak


H. Hero Suprayatno, S.Sos., M.Si
Pembina K.I (IV/b)
Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


Nqr Asikin
Pengatur TK I (II/d)
NIP. 19690808 2003122007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan PPTK yang di Verifikasi	Persen	100
3	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang efektif efisien inovatif akuntabel bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Poin	65
4	Melaksanakan Wajib Laport SPT Tahunan	Wajib Laport SPT DJP Online	Persen	100
5	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Plt. Kepala Dinas Perempuan dan
 Perlindungan Anak

H.Hero Suprayatno, S.Sos., M.Si
 Pembina TK I (IV/b)
 Nip.19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
 Pengadministrasi Perkantoran

Nor Asikin
 Pengatur TK I (II/d)
 NIP. 19690808 2003122007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Sriwardani, S.Sos

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marhaini, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak



Marhaini, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196907042002122007

Pihak Pertama,



Endang Sriwardani, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196804012000032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan	Dokumen	2
2	Menyusun merencanakan dan melakukan kegiatan advokasi perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kob/kota	Perangkat Daerah	11
3	Menyusun merencanakan dan melaksanakan advokasi dan pendampingan advokasi dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil advokasi kebijakn dan pendampingan penyediaan sarana dan prasaranalayanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Dokumen	1

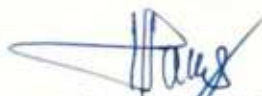
10	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan KIE perlindungan khusus anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah KIE perlindungan khusus anak	Dokumen	2
11	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Dokumen	1
12	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA)	Laporan	48
13	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan Manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak



Marhaini S.E. M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 196907042002122007

Pihak Pertama,



Endang Sriwardani S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 196804012000032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURUL FITRININGSIH,SKM.,MPH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN PEMENUHAN HAK ANAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HERO SUPRAYETNO,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 pada Bidang yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 01 Februari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


H.HERO SUPRAYETNO,S.Sos.,M.Si
PEMBINA UTAMA /IV b
NIP. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK


NURUL FITRININGSIH,SKM.,MPH
PEMBINA/IV a
NIP. 19741121 200502 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK (PK2PHA)

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang terbentuk	Organisasi	10
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan PHA	Dokumen Laporan	5
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Dokumen/ Laporan	3
4.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Lembaga	8
5.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Layanan	2
6.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	Persen	16,00
		Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten	persen	100

		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0.0723
7.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN per tanggal 31 Maret 2024	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
8.	Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen / laporan	7
10.	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
11.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	80-100
12.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Dokumen	7
13.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Bidang PHA	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Laporan/ Dokumen	1
14.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Kegiatan Intervensi Sensitif dalam Menurunkan Prevalensi Stunting	Dokumen / Laporan	3
15.	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Komitmen untuk tidak merokok/Vape di dalam ruangan Bidang PHA dan DP3A	Dokumen tasi	1

16.	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Dokumen	7
-----	------------------------	--	---------	---

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN PEMENUHAN
HAK ANAK (PK2PHA)**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 529.517.800,-	APBD
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 302.632.940,-	APBD
II. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK			
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 137.779.600,-	APBD
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.734.544.820,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2.704.475.160,-	APBD

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2025

Pihak Kedua,
Pt. KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK**


H.HERO SUPRAYETNO, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA /IV b
NIP. 19711122 200003 1 002


NURUL FITRININGSIH, SKM., MPH
PEMBINA/IV a
NIP. 19741121 200502 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saipul Anwar. SPd.,MPd

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nurul Fitriningsih,SKM.,MPH

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

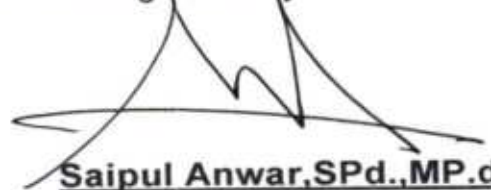
Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

Nurul Fitrianingsi,SKM.,MPH

Pembina (IV/a)
Nip.19741121 200502 2 003

Pihak Pertama,
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda



Saipul Anwar,SPd.,MP.d

Penata TK I / III/d
NIP. 19690310 199103 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
2.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5	Maturnitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturnitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
7	Tertaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

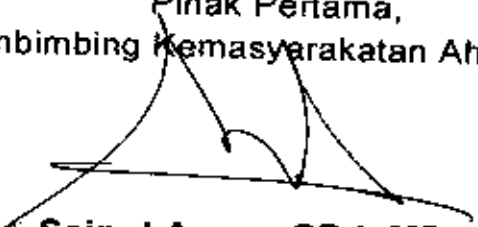
8	Menurunya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
---	-------------------------------	---------------------	--------	------

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak


Nurul Fitrihiningsih, SKM., MPH
Pembina (IV/a)
Nip.19741121 200502 2 003

Pihak Pertama,
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda


Saipul Anwar, SPd., MP.d
Penata TK I / III/d
NIP. 19690310 199103 1 016

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko	Rp. 110.749.600	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 51.576.000	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.548.800	APBD
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 67.520.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.285.394.400	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Peningkatan Kualitas
 Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

Nurul Fitriingsih,SKM.,MPH

Pembina (IV/a)

Nip.19741121 200502 2 003

Pihak Pertama,
 Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda

Saipul Anwar,SPd.,MP.d

Penata TK I / III/d

NIP. 19690310 199103 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tutie Mariani, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nurul Fitriningsih, SKM., MPH

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

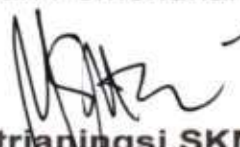
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak



Nurul Fitriani, SKM., MPH

Pembina (IV/a)
Nip.19741121 200502 2 003

Pihak Pertama,
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda



Tutie Mariani, S.Sos., M.Si

Penata TK I / III/d
NIP. 19750418 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
2.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Peresen	100
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

8	Menurunya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
---	-------------------------------	---------------------	--------	------

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak



Nurul Fitrianiingsi, SKM., MPH

Pembina (IV/a)

Nip.19741121 200502 2 003

Pihak Pertama,
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda



Tutie Mariani.S,Sos.,M.Si

Penata TK I / III/d

NIP. 19750418 200902 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITTI ROSNENI,S.Sos

**Jabatan : PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURUL FITRININGSIH,SKM,MPH

**Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;**
- 2. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;**
- 3. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia dan cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN**
- 4. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;**

5. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
6. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
8. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK


NURUL FITRI NINGSIH.SKM.MPH

Pembina (IV/a)
NIP. 197411212005022003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


SITTI ROSNENS.Sos

Penata Tk (III/d)
NIP.19780823 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menerima dan memeriksa obyek kerja urusan peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan, pelembagaan pemenuhan hak anak, serta penguatan dan pengembangan lembaga	Terkumpulnya laporan obyek kerja yang diterima dan diperiksa	Jumlah Dokumen Laporan	12
2	Mempelajari obyek kerja urusan peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan, pelembagaan pemenuhan hak anak, serta penguatan dan pengembangan lembaga	Terkumpulnya Dokumen Analisis hasil study terhadap obyek kerja	Jumlah Dokumen Laporan/ Analisis	12
3	Menata obyek kerja urusan peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan, pelembagaan pemenuhan hak anak, serta penguatan dan pengembangan Lembaga	Terkumpulnya Laporan Obyek Kerja yang ditata	Laporan Obyek Kerja	12
4	Meng konsultasikan kendala sesuai proses penataan obyek kerja urusan peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan, pelembagaan pemenuhan hak anak, serta penguatan dan pengembangan	Terkumpulnya Laporan Kendala yang dikonsultasikan	Laporan Kendala Obyek Kerja	6
5	Mengevaluasi kendala proses penataan obyek kerja dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan obyek kerja urusan peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan, pelembagaan pemenuhan hak anak, serta penguatan dan pengembangan	Terkumpulnya Laporan Evaluasi Kendala	Laporan Eveluasi Kendala	6
7	Laporan Pelaksanaan Tugas Tambahan	Terkumpulnya Laporan	Laporan	12

8	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan SPT Tahunan	Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100%	Persen	100
10	Terlaksananya kepatuhan Input e Pantau dan telah diverifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan	Tingkat Kepatuhan Pelaporan e Pantau setiap bulan	Persen	100
11	Melaksanakan dan melaporkan kegiatan kedinasan yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah Rapat/Kegiatan/Zoom	Rapat/Kegiatan/Zoom	24

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK


NURUL FITRININGSIH.SKM.MPH
Pembina (IV/a)
NIP. 197411212005022003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


SITTI ROSENENS.Sos
Penata TK (III/d)
NIP.19780823 200902 2 002

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KAB/KOTA	302,632,940	APBD
2.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KAB/KOTA	106,795,360	APBD
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWEANGAN KAB/KOTA	86,203,600	APBD
		495,631,900	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

NURUL FITRI NINGSIH, SKM, MPH

Pemhina (IV/a)

NIP. 197411212005022003

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2025

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SITTI ROSNENIS, Sos

Penata Tk1 (III/d)

NIP.19780823 200902 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJI SELAMAT, SE

Jabatan : PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURUL FITRININGSIH,SKM.,MPH

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut hasil survei pelayanan publik;
4. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARYANI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURUL FITRININGSIH,SKM.,MPH
Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut hasil survei kepuasan kepuasan masyarakat, mengukur indeks kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik;
4. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan penanganan secara efektif dan efisien.

5. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegritas ,akurat,mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan satu data indonesia guna mendukung perencanaan,pelaksanaan,evaluasi,dan pengambilan kebijakan yang berbasis data
6. Terwujudnya ASN yang religius. Berakhlak Mulia, dan cinta AL-Qur'an melalui Penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari Pembentukan karakter ASN
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 01 Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA DAN PEMENUHAN HAK ANAK**

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



NURUL FITRININGSIH.SKM.MPH



MARYANI

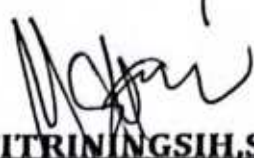
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintahan Non pemerintahan dan Dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Kegiatan rekapitulasi data dan administrasi surat-menyurat pda pelembagaan pha pada Lembaga pemerintahan Non pemerintahan dan dunia usaha	Data/surat	80-100
2	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kegiatan rekapitulasi data dan administrasi surat-menyurat pada kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Data/surat	80-100
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai(SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100 % Paling lambat akhir bulan Februari Setiap tahun	Dokumen	1
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 01 Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
 KELUARGA DAN PEMENUHAN HAK ANAK**

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


NURUL FITRININGSIH.SKM.MPH

Pembina (IV/a)

NIP. 107411312005022002



MARYANI

Pengatur Tk.I (II/d)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Chalimatus Sa'diah, S.Kom., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos. M.Si
Jabatan : Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
- 3 Melaksanakan dan penilaian dan rencana kerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
- 7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas publik melalui pengukuran tindak lanjut konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

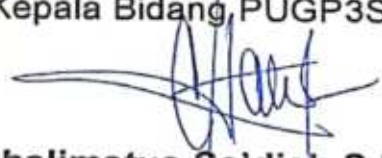
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas


H. Hero Suprasetno, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PUGP3SDGA


Hj. Chalimatus Sa'diah, S.Kom., M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,149999999999999
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,33000000000000002
3	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,039
4	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah dan Pemerintah Desa yang dilembagakan	Dokumen/Perangkat Daerah	25
5	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Jumlah Perempuan yang bergerak dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat pelatihan.	Dokumen/Organisasi	30

	Kabupaten/Kota			
6	Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga/Dokumen/Orang	28
7	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Dokumen	3
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat kepatuhan penyampaian atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100 % per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
8	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat kepatuhan penyampaian atas SPT Tahunan 100 % per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
9	Menyampaikan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
10	Terlaksananya kepatuhan input SIRUP	Tingkat kepatuhan input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahunnya	Persen	100
11	Terlaksananya kepatuhan input e-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-Pantau dan telah diverifikasi 100% setiap bulannya	Persen	100

12	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
13	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13	Penerapan Core Values ASN	Internalisasi Core Values ASN "BerAKHLAK"	Persen	100
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau

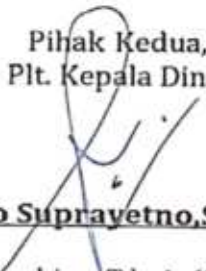
19	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
20	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.194.137.300	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 172.195.100	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 1.366.332.400	APBD

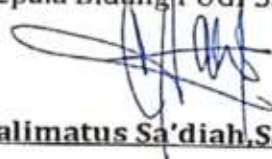
Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas


H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PUGP3SDGA


Hj. Chalimatus Sa'diah, S.Kom., M.Si.

Pembina, (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Sofyan Hamid.,S.Sos., M.Si

Jabatan : Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Chalimatus Sa'diah.,S.Kom.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Membuat dan menyampaikan Laporan SPT Tahunan per 31 Maret setiap tahunnya
2. Terpenuhinya Dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Terpenuhinya Dokumen SKP paling Lambat Akhir Bulan Februari setiap tahunnya.;
4. Terpenuhinya Rencana Kerja Pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAkhlak".
5. Terwujudnya ASN yang religious, berAkhlak Mulia dan Cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bahan dari pembentukan karakter ASN;
6. Melaksanakan terlaksannaya Pembangunan yang berbasis kesetaraan Gender;

7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SERTA PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK


Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
PEJABAT FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
AHLI MUDA


AKHMAD SOFYAN HAMID, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690214 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menganalisa dan Mengumpulkan bahan – bahan dan data informasi gender pada pelaksanaan kegiatan pelebagaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum	Jumlah penyiapan bahan dokumen Urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan yang terkait dengan anggaran yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum dengan menggunakan metode penyusunan gender analisis pathway (GAP);	Jumlah dokumen penguatan dan pelebagaan responsif gender Urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
3	Menganalisa serta menelaah berdasarkan permasalahan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi;	Jumlah dokumen peningkatan kualitas penguatan dan lembaga pengarusutamaan gender	Dokumen	1
4	Membuat laporan berdasarkan permasalahan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Jumlah kegiatan terkait dengan urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
5	Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisa data dan informasi pada pelaksanaan kegiatan terkait dengan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan politik, hukum , sosial dan ekonomi	Jumlah laporan terkait dengan urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1

6	Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.	Jumlah laporan tugas kedinasan terkait dengan urusan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen	1
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	1
9	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Dokumen	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.194.137.300	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	RP. 172.195.100	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.366.332.400	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA
 PENGELOLAAN SISTEM DATA
 GENDER DAN ANAK



Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
 PEJABAT FUNGSIONAL
 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
 AHLI MUDA



AKHMAD SOFYAN HAMID., S.Sos., M.Si
 Pembina (IV/a))
 NIP. 19690214 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. Chairudin,S.Sos

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Chalimatus Sa'diah,,S.Kom.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Membuat dan menyampaikan Laporan SPT Tahunan per 31 Maret setiap tahunnya
2. Terpenuhiya Dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Terpenuhiya Dokumen SKP paling Lambat Akhir Bulan Februari setiap tahunnya.;
4. Terpenuhiya Rencana Kerja Pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAkhlak".
5. Terwujudnya ASN yang religious, berAkhlak Mulia dan Cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bahan dari pembentukan karakter ASN;
6. Melaksanakan terlaksannaya Pembangunan yang berbasis kesetaraan Gender;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menganalisa dan Mengumpulkan bahan – bahan urusan dan data informasi gender pada pelaksanaan kegiatan pelebagaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum	Jumlah penyiapan bahan dokumen Urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan urusan terkait anggaran yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum dengan menggunakan metode penyusunan gender analisis pathway (GAP);	Jumlah dokumen penguatan dan pelebagaan responsif gender Urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
3	Menganalisa serta menelaah berdasarkan permasalahan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi;	Jumlah dokumen peningkatan kualitas penguatan dan lembaga pengarusutamaan gender	Dokumen	1
4	Membuat laporan berdasarkan permasalahan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Jumlah kegiatan terkait dengan urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
5	Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisa data dan informasi pada pelaksanaan kegiatan terkait dengan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan	Jumlah laporan terkait dengan urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1

7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SERTA PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK


Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


S. CHAIRUDIN, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700705 200604 1 011

	perempuan politik, hukum , sosial dan ekonomi			
6	Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.	Jumlah laporan tugas kedinasan terkait dengan urusan bidang politik, hukum , sosial dan ekonomi	Dokumen	1
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	1
9	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Dokumen	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.194.137.300	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	RP. 172.195.100	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.366.332.400	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA
PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK



Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



S. CHAIRUDIN, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700705 200604 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RITA AMANDA, S.Sos

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Informasi Teknologi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HJ. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja berupa data, mempelajari, menganalisa, serta menelaahnya sesuai dengan sub kegiatan dalam bidangnya;
2. Membuat dan menyampaikan Laporan SPT Tahunan per 31 Maret setiap tahunnya;
3. Terpenuhiya Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Terpenuhiya Dokumen SKP paling lambat akhir bulan februari setiap tahunnya;
5. Terpenuhiya dan Rencana Kerja Pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
6. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegritas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;
7. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bahan dari pembentukan karakter ASN;
8. Melaksanakan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak Kedua :

1. Melakukan suvervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini; dan
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender,
Pemberdayaan Perempuan serta
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



HJ. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom, M.Si

Pembina / IVa

NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Informasi
Teknologi



RITA AMANDA, S.Sos

Penata / IIIc

NIP. 19820908 200701 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
01.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja berupa data, mempelajari, menganalisa serta menelaahnya sesuai dengan sub kegiatan dalam bidangnya;	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Sub Kegiatan	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen Sub Kegiatan	Dokumen	4
		Jumlah Dokumen Sub Kegiatan	Dokumen	3
02.	Terpenuhinya Laporan SPT Tahunan per 31 Maret setiap tahunnya;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
03.	Terpenuhinya Dokumen Perjanjian Kinerja;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
04.	Terpenuhinya Dokumen SKP paling lambat akhir bulan februari setiap tahunnya;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
05.	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
06.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
07.	Terciptanya Tata Kelola Arsip;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
08.	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengarusutamaan
Gender, Pemberdayaan Perempuan
serta Pengelolaan Sistem Data Gender
dan Anak**



HJ. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
**Penata Kelola Sistem dan Informasi
Teknologi**



RITA AMANDA, S.Sos
Penata / Ilc
NIP. 19820908 200701 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Fitriani,SE

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Chalimatus Sa'diah,.S.Kom.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Membuat dan menyampaikan Laporan SPT Tahunan per 31 Maret setiap tahunnya
2. Terpenuhiya Dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Terpenuhiya Dokumen SKP paling Lambat Akhir Bulan Februari setiap tahunnya.;
4. Terpenuhiya Rencana Kerja Pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAkhlak;
5. Terwujudnya ASN yang religious, berAkhlak Mulia dan Cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bahan dari pembentukan karakter ASN;
6. Melaksanakan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan Gender;

7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;
8. Terwujudnya ASN yang religious, berAKHLAK mulia dan cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bahan dari pembentukan karakter ASN.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SERTA PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK


Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


RINA FITRIANI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700705 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menganalisa dan Mengumpulkan bahan – bahan urusan dan data informasi gender pada pelaksanaan kegiatan pelebagaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum	Jumlah penyiapan bahan dokumen Urusan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen	1
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan urusan terkait anggaran yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum dengan menggunakan metode penyusunan gender analisis pathway (GAP);	Jumlah dokumen penguatan dan pelebagaan responsif gender Urusan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen	1
3	Menganalisa serta menelaah berdasarkan permasalahan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen peningkatan kualitas penguatan dan lembaga pengarusutamaan gender	Dokumen	1
4	Membuat laporan berdasarkan permasalahan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah kegiatan terkait dengan urusan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen	1
5	Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisa data dan informasi pada pelaksanaan kegiatan terkait dengan urusan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah laporan terkait dengan urusan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen	1

6	Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.	Jumlah laporan tugas kedinasan terkait dengan urusan bidang politik, Hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen	1
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Dokumen	1
9	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Dokumen	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.194.137.300	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	RP. 172.195.100	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.366.332.400	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA
PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK



Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



RINA FITRIANI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760830 200701 2 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Ariani Rahmadhianty
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, .S.Kom., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PENGELOLAAN
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan penilaian dan rencana kerja pegawai serta nilai-nilai ASN "berAKHLAK";
2. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia dan cinta Al-Quran melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
3. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip pada Perangkat Daerah;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SERTA PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK



Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASIAN
PERKANTORAN



Irma Ariani Rahmadhianty
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197609202007012010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Membantu melengkapi Administrasi perumusan Perbup PUG dan PPRG	Persen	100
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan penyampaian SPT Tahunan.	Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100 % per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat di awal bulan setiap tahun.	persen	100
4	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Melengkapi administrasi pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)	Dokumen	25
5	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Melengkapi administrasi dokumen dan pelatihan pada kegiatan organisasi perempuan.	Dokumen/ organisasi	30
6	Penguatan dan pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Melengkapi administrasi dokumen Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga/ Dokumen/ orang	28
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	persen	50
9	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Internalisasi Core Values ASN ber'AKHLAK"	Persen	100
10	Menyampaikan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan penyampaian SKP 100 % paling lambat awal bulan dan setiap tahun	Persen	100

11	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Melaksanakan kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Kegiatan	100
----	---	---	----------	-----

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.194.137.300	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 172.195.100,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 1.366.332.400	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA
PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK


Hj. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720402 200312 2 003

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASIAN
PERKANTOR


IRMA ARIANI RAHMADHIANTY
Pengtaur Tingkat I (II/d)
NIP. 197609202007012010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. MARHAINI, S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HERO SUPRAYETNO, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah tempat saya bertugas;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINA HARIYANI, S.E.

Jabatan : PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. MARHAINI, S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah tempat saya bertugas;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK



Hj. MARHAINI, S.E., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
AHLI MUDA



RINA HARIYANI, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19711023 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
2	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	11
3	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
4	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30
5	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1

6	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	50
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2
8	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	3
9	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50
10	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	2
11	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
12	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
13	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

14	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
15	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
16	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase tingkat Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Persentase Penerapan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	300.000.000	APBD
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	250.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		550.000.000	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK


HI. MARHAINI, S.E., M.Si.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
AHLI MUDA


RINA HARIYANI, S.E.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19711023 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI IRAWAN, S.E.

Jabatan : ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. MARHAINI, S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah tempat saya bertugas;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

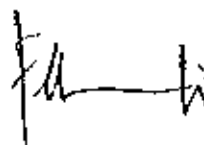
Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK



HJ. MARHAINI, S.E., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK



FAUZI IRAWAN, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19790416 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
2	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	11
3	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
4	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30
5	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1

6	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	50
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2
8	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	3
9	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50
10	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	2
11	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
12	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

13	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
14	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase tingkat Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Persentase Penerapan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

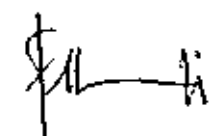
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	400.000.000	APBD
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	750.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.150.000.000	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK


HJ. MARHAINI / S.E., M.Si.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK


FAUZI IRAWAN, S.E.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19790416 200902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENNY INDRIA SARI, S.Sos.

Jabatan : ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. MARHAINI, S.E.,M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah tempat saya bertugas;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

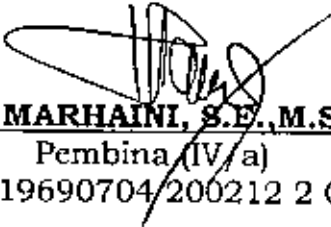
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK

Pihak Pertama,
ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK


Hj. MARHAINI, S.P., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690704/200212 2 007

HENNY INDRIA SARI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731018 200801 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
2	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	11
3	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
4	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30
5	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1

6	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	50
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2
8	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	3
9	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50
10	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	2
11	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48

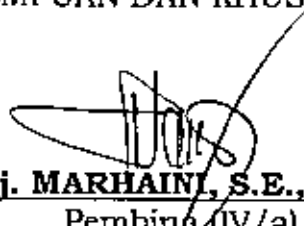
13	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
----	--	---------------------	-------	----

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

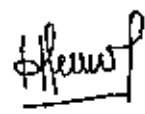
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK**


Hj. MARHAINI, S.E., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
**ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK**


HENNY INDRIA SARI, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731018 200801 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAHRINA, SH**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MARHAINI, SE., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan Teknik dalam mengolah obyek kerja ;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek kerja ;
3. Menganalisa obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk ;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis obyek yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah ;

5. Mencatat perkembangan dan permasalahan obyek kerja secara periodic sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui Langkah pemecahannya ;
6. Mengolah dan menyajikan obyek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut ;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban ;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat Daerah;
10. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara ;
11. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP);
12. Terwujudnya Kawasan Tanpa Asap Rokok/Vape

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Tenggarong, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK**


Hj. MARHAINI, SE., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA DAN
INFORMASI**


SAHRINA, SH
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19740709 200701 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
2.	Melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	11
3.	Melaksanakan Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi Kabupaten/Kota	Dokumen	1
4.	Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	30

5.	Melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
6.	Melaksanakan advokasi dan pendampingan perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Orang	50
7.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
8.	Melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Kerjasama antar Lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	3
9.	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang	50
10	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan	Dokumen	1

	penyedia layanan anak dan memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten/Kota	perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
11	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA) diperangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	48
12	Melaksanakan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Persentase tercapainya RB Kabupaten	Persen	65
13	Melaksanakan tata Kelola arsip perangkat Daerah	Persentase penilaian tata Kelola arsip perangkat Daerah	Persen	100

Tenggarong, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK**


Hi. MARHAINI, SE., M.Si
PEMBINA (W/a)
NIP. 19690704 200212 2 007

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA DAN
INFORMASI**


SAHRINA, SH
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19740709 200701 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Sriwardani, S.Sos

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marhaiini, SE, .M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak



Marhaini, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196907042002122007

Pihak Pertama,



Endang Sriwardani, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196804012000032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan	Dokumen	2
2	Menyusun merencanakan dan melakukan kegiatan advokasi perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kob/kota	Perangkat Daerah	11
3	Menyusun merencanakan dan melaksanakan advokasi dan pendampingan advokasi dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil advokasi kebijakn dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Dokumen	1

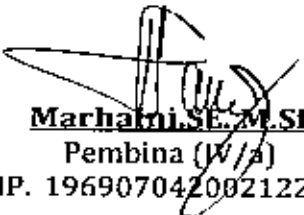
10	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan KIE perlindungan khusus anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah KIE perlindungan khusus anak	Dokumen	2
11	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Dokumen	1
12	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA)	Laporan	48
13	Menyusun merencanakan dan melaksanakan kegiatan Manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAKKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Khusus Anak


Marhatni SE, M.Si
Pembina (W/a)
NIP. 196907042002122007

Pihak Pertama,


Endang Sriwardani S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196804012000032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faridah, S.KM., M.Adm.Kes

Jabatan : Kepala UPT P2TP2A

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si

**Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan Masyarakata , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt.Kepala DP3A,


H. Hero Suprayetro, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala UPT P2TP2A


Faridah, S.KM., M.Adm.Kes
Pembina (IV.a)
NIP. 19731221 199302 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,3300000000 0000002
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,039
3	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100

7	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Membaca Kitab Suci" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Membaca Kitab Suci	Laporan	48
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau

15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
----	---	---	--------	-----

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala DP3A,



H. Hero Suprayono, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19711122 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala UPT P2TP2A



Faridah, S.KM., M.Adm.Kes
Pembina (IV.a)
NIP. 19731221 199302 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusen, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Tata Usaha UPT P2TP2A

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Faridah, S.KM., M.Adm.Kes

Jabatan : Kepala UPT P2TP2A

**Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:**

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;**
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi**
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan kepuasan Masyarakat , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;**
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;**
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;**

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala UPT P2TP2A,


Faridah, S.KM., M.Adm.Kes
Pembina (IV.a)
NIP. 19731221 199302 2 005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Tata Usaha
UPT P2TP2A


Lusen, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19800312 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,3300000000 0000002
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,039
3	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100

7	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Membaca Kitab Suci" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Membaca Kitab Suci	Laporan	48
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau

15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
----	---	---	--------	-----

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,250,000,000	APBD
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	750 ,000,000	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala UPT P2TP2A,



Faridah, S.KM., M.Adm.Kes
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19731221 199302 2 005

Pihak Pertama,

Kepala Sub Tata Usaha
UPT P2TP2A,



Lusen S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19800312 201001 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Ashari
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Faridah, S.KM., M.Adm.Kes
Jabatan : Kepala UPT P2TP2A

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan kepuasan Masyarakat , Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala UPT P2TP2A,



Faridah, S.KM. M.Adm.Kes
Pembina (IV.a)
NIP. 19731221 199302 2 005

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,



Riski Ashari
Pengatur Tk.I (II.d)
NIP. 19861119 201001 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Penata Usahaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip yang tersedia	Berkas	50
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Tersedianya Data Bulanan Aplikasi SIMFONI	Dokumen	12
4	Terlaksananya "Gerakan Etam Membaca Kitab Suci" (GEMA) di perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan "Gerakan Etam Membaca Kitab Suci	Dokumentasi	48
5	Terkelolanya data adminitrasi kepegawaian	Jumlah data adminitrasi kepegawaian	Dokumen	24
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil survey yang di isi masyarakat	Nilai	90